MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam upaya untuk penyelesaian penataan non-ASN di Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 290 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Nasional Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCCXXI
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

# RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|
| A . | GURU | 487 | |
| 1. | GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM | 8 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA | 33 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5. | GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS | 21 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6. | GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 7. | GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA | 16 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 8. | GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 9. | GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD | 270 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 10. | GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA | 13 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 11. | GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES | 101 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 12. | GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN | 5 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 13. | GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN | 13 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 14. | GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 15. | GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

panrb

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|
| B . | TENAGA KESEHATAN | 77 | |
| 1. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA |
| 2. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT |
| 3. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| SEKRETARIAT |
| 4. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS KUNIR |
| 5. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| BIDANG PELAYANAN KESEHATAN |
| 6. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN |
| 7. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS PASIRIAN |
| 8. | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN \| KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS |
| 9. | APOTEKER AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PENUNJANG \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG |
| 10. | APOTEKER AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 11. | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PENUNJANG \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG |
| 12. | ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 13. | BIDAN AHLI PERTAMA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PELAYANAN \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN |
| 14. | BIDAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS TUNJUNG |
| 15. | BIDAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS RANUYOSO |
| 16. | BIDAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS ROGOTRUNAN |
| 17. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS PASRUJAMBE |
| 18. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS TEMPEH |
| 19. | BIDAN TERAMPIL | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PELAYANAN \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN |
| 20. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS PASIRIAN |
| 21. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|
| 22. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS GUCIALIT |
| 23. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS KEDUNGJAJANG |
| 24. | BIDAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS YOSOWILANGUN |
| 25. | DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 26. | DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM) | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS KEDUNGJAJANG |
| 27. | EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| UPT LABORATORIUM KESEHATAN \| LAB. KES DAERAH KAB. LUMAJANG |
| 28. | FISIOTERAPIS TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PELAYANAN \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN |
| 29. | NUTRISIONIS AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PENUNJANG \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG |
| 30. | PERAWAT AHLI PERTAMA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PELAYANAN \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN |
| 31. | PERAWAT AHLI PERTAMA | 8 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 32. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS PENANGGAL |
| 33. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS LABRUK KIDUL |
| 34. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS GESANG |
| 35. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS SUKODONO |
| 36. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS PRONOJIWO |
| 37. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS RANUYOSO |
| 38. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS CANDIPURO |
| 39. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS PASRUJAMBE |
| 40. | PERAWAT TERAMPIL | 9 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 41. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS RANDUAGUNG |
| 42. | PERAWAT TERAMPIL | 3 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PELAYANAN \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PELAYANAN |
| 43. | PERAWAT TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS BADES |

| NO | JABATAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|
| 44. | PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 45. | PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PENUNJANG \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG |
| 46. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN |
| 47. | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BIDANG PENUNJANG \| KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENUNJANG |
| 48. | TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD PASIRIAN \| BAGIAN TATA USAHA \| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN UNIT UMUM |
| 49. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WADIR UMUM DAN KEUANGAN |
| 50. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS SUMBERSARI |
| 51. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS JATIROTO |
| 52. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS SENDURO |
| 53. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS TEMPEH |
| 54. | TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| PUSKESMAS TUNJUNG |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| C . | TENAGA TEKNIS | | 89 | |
| 1. | ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA | S-1 PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 AKUAKULTUR ; S-1 ANALIS KIMIA ; S-1 BIOLOGI ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 KIMIA ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR ; S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERIKANAN \| BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA |
| 3. | ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI |
| 4. | ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |
| 5. | ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK |
| 6. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; S-1 POLITIK ISLAM ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ISLAM ; S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 ILMU POLITIK | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK \| BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA |
| 7. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 POLITIK ISLAM ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK \| BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK |
| 8. | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI ; S-1 HUKUM ; S-1 PENDIDIKAN ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SASTRA INDONESIA | 5 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 9. | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH \| BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH |
| 10. | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN ADMINISTRASI \| BAGIAN UMUM |
| 11. | OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL | D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 12. | PEMADAM KEBAKARAN PEMULA | SLTA/SMA SEDERAJAT | 5 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 13. | PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK MATERIAL ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV HUKUM ; D-IV TEKNIK MATERIAL ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK GEODESI ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; S-1 EKONOMI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG \| BIDANG TEKNIS DAN KONTRUKSI |
| 14. | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA | S-1 PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN ; S-1 BIOLOGI ; D-IV BIOLOGI ; D-IV ILMU GIZI ; S-1 ILMU GIZI ; D-IV TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 KIMIA ; D-IV ILMU PANGAN ; S-1 ILMU PANGAN | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERIKANAN \| BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
| 15. | PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN GEDUNG ; S-1 DESAIN INTERIOR ; S-1 TEKNIK FISIKA ; D-IV TEKNIK FISIKA ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN KOTA ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 16. | PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 17. | PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ; D-IV HUKUM ; S-1 EKONOMI ; D-IV ILMU EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV JASA KONSTRUKSI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | WILAYAH DAN KOTA ; D-IV PLANOLOGI ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI | | |
| 18. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN TRANSPORTASI ; S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI ; D-IV KEPENDUDUKAN ; S-1 KEPENDUDUKAN ; D-IV KETAHANAN NASIONAL ; S-1 KETAHANAN NASIONAL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG ; D-IV STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 STUDI PEMBANGUNAN | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
| 19. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV/S-1 AKUNTANSI ; D-IV/S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| 20. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV/S-1 EKONOMI ; D-IV/S-1 AKUNTANSI ; D-IV/S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI ; S-1 ADMINISTRASI ; D-IV TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK |
| 21. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | S-1/D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG CIPTA KARYA |
| 22. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV/S-1 AKUNTANSI ; D-IV/S-1 MANAJEMEN ; D-IV/S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 ADMINISTRASI | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT \| BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 23. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 24. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | D-IV RANCANG KOTA ; S-1 RANCANG KOTA ; D-IV TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG \| BIDANG TEKNIS DAN KONTRUKSI |
| 25. | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |
| 26. | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI |
| 27. | PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA | D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 STATISTIKA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK |
| 28. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PARIWISATA \| BIDANG EKONOMI KREATIF KEPARIWISATAAN |
| 29. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN ADMINISTRASI \| BAGIAN UMUM |
| 30. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH \| BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| 31. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU \| BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN |
| 32. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 33. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN ADMINISTRASI \| BAGIAN ORGANISASI |
| 34. | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | SLTA/SMA SEDERAJAT | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PARIWISATA \| BIDANG DESTINASI PARIWISATA |
| 35. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III RANCANG KOTA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN \| BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
| 36. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III TEKNIK ATAU REKAYASA KESELAMATAN ; D-III PEMERINTAHAN ; D-III PLANOLOGI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA \| BIDANG PERLINDUNGAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MASYARAKAT \| SEKSI. PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN |
| 37. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III TEKNIK ELEKTRO | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WADIR UMUM DAN KEUANGAN \| KEPALA BAGIAN UMUM |
| 38. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT ; D-III INFORMATIKA ; D-III TELEKOMUNIKASI ; D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA ; D-III MANAJEMEN ; D-III TRANSPORTASI DARAT ; D-III LLAJ ; D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI ; D-III TRANSPORTASI | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERHUBUNGAN \| BIDANG TEKNIK PRASARANA \| SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN |
| 39. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG \| BIDANG BINA MARGA |
| 40. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III TRANSPORTASI DARAT ; D-III LLAJ ; D-III TRANSPORTASI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERHUBUNGAN \| BIDANG LALU LINTAS \| SEKSI. KESELAMATAN LALU LINTAS |
| 41. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNIK INFORMATIKA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH \| BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
| 42. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNIK INFORMATIKA | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH \| BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH \| SUBID. PENATAUSAHAAN BARANG |
| 43. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III PEMERINTAHAN ; D-III ADMINISTRASI ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARIWISATA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PARIWISATA \| BIDANG DESTINASI PARIWISATA |
| 44. | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 BISNIS ; S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 PENDIDIKAN EKONOMI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 PENDIDIKAN BISNIS ; S-1 HUKUM BISNIS | 3 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN \| BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| 45. | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA | D-IV PENYULUH PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU KELAUTAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS PERIKANAN \| BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN |
| 46. | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 BIOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 FISIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 SOSIAL ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KIMIA ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOFISIKA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | 3 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 47. | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 EKONOMI ISLAM ; S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM SYARIAH | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 48. | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 ADMINISTRASI ; S-1 TEKNIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| SEKRETARIAT |
| 49. | PERENCANA AHLI PERTAMA | S-1 HUKUM ISLAM ; S-1 ADMINISTRASI ; S-1 TEKNIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU SOSIAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| SEKRETARIAT |
| 50. | PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA | S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 AKUNTANSI | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| SEKRETARIAT DPRD \| BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 51. | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | S-1 ILMU KOMUNIKASI | 3 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA \| BIDANG INFORMASI PUBLIK |
| 52. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \| RSUD DR HARYOTO \| WADIR UMUM DAN KEUANGAN |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI PPPK | UNIT PENEMPATAN |
|---|---|---|---|---|
| 53. | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | D-IV TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER | 2 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 54. | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA \| BIDANG APLIKASI INFORMATIKA |
| 55. | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA | 4 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 56. | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH \| SEKRETARIAT |
| 57. | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM | 1 | PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG \| SEKRETARIAT DAERAH \| DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

BHINNEKA TUNGGAL IKA
panrb